

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian lahan kering untuk menopang ketahanan pangan nasional hendaknya menjadi agenda pembangunan yang diprioritaskan. Target produksi pangan nasional tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan lahan sawah karena banyak kendala yang dihadapi, baik itu perubahan iklim, alih fungsi lahan maupun lingkungan produksi.

Pada dasarnya, lahan kering merupakan bagian masa depan pertanian dan kekuatan ekonomi pedesaan Indonesia. Namun kebijakan yang berkembang saat ini belum dapat mengoptimalkan manfaat dan potensi lahan kering yang tersedia. Terlihat dari sarana dan prasarana yang belum menyuluruh, mengakibatkan potensi lahan kering dalam mendukung ketahanan pangan nasional tidak berfungsi secara optimal (Balitbang, 2012).

Permasalahan lainnya adalah masalah pertumbuhan penduduk yang terus mendesak lahan kering untuk pertanian. Pertumbuhan penduduk pada daerah lahan kering menyebabkan penurunan kualitas dan potensi produksi lahan kering. Hal ini antara lain disebabkan oleh tekanan penduduk yang berakibat pada penurunan kemampuan sumberdaya alam untuk merevitalisasi fungsinya untuk mendukung sistem usahatani. Penelitian yang dilakukan FAO (2008) dalam Kasryno dan Soeparno (2012), menunjukkan bahwa penyebab kerusakan sumberdaya lahan kering ini sangatlah kompleks terutama disebabkan oleh kegagalan kebijakan dan kegagalan pasar ketimbang kegagalan petani dalam mengelola lahan kering. Pada umumnya pemerintah kurang menaruh perhatian yang cukup pada pengelolaan lahan kering secara berkelanjutan.

Sebagian besar lahan kering memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah, terutama pada tanah-tanah yang telah tererosi, sehingga lapisan olah tanah menjadi tipis dan kadar bahan organik yang rendah. Penurunan potensi lahan kering yang disebabkan oleh faktor-faktor diatas sangat berpengaruh terhadap kerawanan pangan dan peningkatan kemiskinan, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Tingkat kemiskinan di ketiga lokasi ini adalah yang tertinggi di Indonesia, yaitu 21%, 23% dan 32%

pada tahun 2011 (tingkat kemiskinan rata-rata di Indonesia saat itu adalah 12,5%). Kondisi tersebut timbul karena penambahan penduduk yang pesat di lokasi-lokasi berlahan kering tersebut (Balitbang Pertanian, 2012).

Data BPS Tahun 2015, jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah 0,86 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mencapai 10,65 juta orang, sementara di daerah perdesaan mencapai 17,94 juta orang. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia sebesar 15,45 juta orang (54,05 persen).

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sektor pertanian tanaman pangan mempunyai peranan yang sangat besar, akan tetapi pembangunan pertanian dimasa mendatang akan menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Menurut data BPS tahun 2015, hal ini terkait dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan rata-rata peningkatan 1,40 % per tahun serta pertumbuhan sektor industri pakan ternak ataupun industri makanan, sehingga hal ini akan berdampak terhadap kebutuhan pangan yang semakin meningkat, khususnya tanaman padi dan padi lahan kering sebagai bahan pangan pokok masyarakat dan sebagai bahan baku industri.

Karakteristik penduduk miskin diantaranya dapat dicirikan oleh beberapa hal, yaitu : (a) masyarakat miskin sebagian besar tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani, (b) sebagian besar penduduk berpenghasilan rendah mengkonsumsi energi kurang dari 2.100 kkal/hari, (c) berdasarkan indikator silang proporsi pengeluaran pangan (>60%) dan kecukupan gizi (energi <80%), diperoleh proporsi rumah tangga rawan pangan nasional mencapai sekitar 30%, dan (d) penduduk miskin dengan tingkat SDM yang rendah, umumnya tinggal di wilayah dengan karakteristik marjinal, dukungan infrastruktur terbatas, dan tingkat adopsi teknologi rendah (Pasaribu, 2006).

Potensi lahan kering untuk mendukung peningkatan produksi padi nasional masih cukup besar. Pemanfaatan lahan kering untuk pertanaman padi baru mencapai 1,19 juta ha (6,89%) dari potensi lahan kering seluas 17,21 juta ha. Kontribusi produksi padi ladang yang diperoleh sebesar 5,45% terhadap produksi

padi nasional. Kalau dilihat antara Jawa dan luar Jawa, potensi lahan kering tersebut lebih besar di luar Jawa yaitu seluas 14,67 juta ha (82,70%) dibandingkan dengan potensi lahan kering di Jawa hanya seluas 3,06 juta ha (17,30%) (Dirjen TP, 2014).

Hal ini juga dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan lahan kering untuk pertanaman padi masih rendah yaitu 6,42%, di luar pulau Jawa sebesar 5,26% dibandingkan dengan pulau Jawa sebesar 12,72% dari potensi lahannya yang tersedia. Khusus untuk di Propinsi Jawa Barat Potensi Lahan kering untuk tegal/kebun seluas 568.685 Ha dan ladang/huma seluas 219.469 Ha. Sedangkan untuk luas panen padi ladang di Propinsi Jawa Barat berdasarkan Angka Tetap yang dikeluarkan oleh BPS Tahun 2014 seluas 124.934 Ha. Dan luas panen terluas terdapat di Kabupaten Garut yaitu seluas 30.304 Ha (ATAP BPS, 2014).

Dari data BPS Kabupaten Garut, menunjukkan bahwa Kabupaten Garut selama beberapa tahun terakhir diketahui jumlah penduduk miskinnya berfluktuatif. Pada Tahun 2015 mencapai 12,81%, mengalami peningkatan sebesar 10,07 ribu jiwa (3,19%) dari Tahun 2014 sebesar 12,47%. Persentase penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Garut terjadi pada Tahun 2006 dan 2008, yaitu sebesar 19,61%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor alam maupun faktor ekonomi. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin namun jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan relatif besar.

B. Perumusan Masalah

Potensi lahan kering sebagai penghasil pangan utama (padi) masih kurang dipahami, terlupakan, diabaikan, atau bahkan terbelakang. Pandangan negatif lainnya dikaitkan dengan sikap budaya masyarakat terhadap lahan kering yang sering dinilai sebagai sikap terbelakang. Selain itu, ketersediaan teknologi tepat-guna untuk memproduksi bahan pangan di lahan kering kurang diketahui masyarakat, khususnya masyarakat petani. Ketersediaan informasi dan kepustakaan lahan kering yang masih sangat sedikit dibandingkan dengan lahan sawah, juga turut berperan dalam mendorong perhatian atas lahan kering.

Rendahnya produktivitas padi lahan kering di tingkat petani ini lebih disebabkan karena faktor keterbatasan pengetahuan petani dalam pengelolaan

tanaman seperti, penerapan teknologi budidaya yang belum optimal, terutama dalam penggunaan varietas unggul, pemupukan, dan pengendalian penyakit seperti penyakit blas (*P. gresea*) yang merupakan masalah utama padi lahan kering. Selain itu, pada umumnya petani padi lahan kering termasuk golongan petani miskin yang tentu saja memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, petani padi lahan kering biasanya mengolah tanaman dengan “apa adanya”.

Kesenjangan hasil antara padi sawah dan padi gogo menunjukkan bahwa pendapatan dan kesejahteraan petani padi sawah lebih tinggi dibanding petani lahan kering. Dalam keadaan demikian petani lahan kering tidak akan mampu menerapkan anjuran teknologi yang bersifat padat modal. Kelangkaan tenaga kerja sering pula menghambat peningkatan intensitas tanam padi lahan kering. Menurut McIntosh (1986) dalam Toha, 2012. Teknologi sistem usahatani introduksi tidak saja memerlukan tambahan modal, tetapi juga bersifat padat tenaga kerja sehingga tidak mungkin dipenuhi oleh tenagakerja keluarga. Tenaga kerja keluarga untuk mengelola sistem usahatani berbasis padi lahan kering hanya mampu mengelola 0,7 ha/tahun.

Adopsi teknologi pengembangan sistem usahatani berbasis padi lahan kering sering pula ditentukan oleh stabilitas produksi dan pemasaran. Baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa, sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi sangat minim. Keadaan demikian menempatkan petani dalam posisi lemah dalam pemasaran, terutama pemasaran hasil pertanian yang tidak tahan simpan (Toha, 2012).

Dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi sekarang ini, pembangunan pertanian diletakkan sebagai basis utama dalam upaya penanggulangan dampak krisis yang lebih parah. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pembangunan pertanian saat ini adalah meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan (*people centered development*). Model pembangunan demikian merupakan arah utama bagi pembangunan pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui perkembangan struktur masyarakat tani yang muncul dan kemampuan masyarakat tani sendiri.

Masalah ini terjadi khususnya pada petani-petani padi lahan kering dengan modal usahatani yang minim atau rendah. Petani padi lahan kering ini biasanya

memiliki lahan tani yang tidak cukup luas ($\pm 0,2$ Ha), disertai oleh keterbatasan aksesibilitas terhadap peluang ekonomi sebagai sumber pendapatan di luar pertanian. Menurut Suntoro (1989), bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang atau lingkungannya. Faktor eksternal merupakan hambatan yang bersifat struktural.

Rendahnya pendapatan petani juga berkaitan dengan rendahnya hasil usahatani yang terjual. Ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah juga menjadi salah satu kendala yang terjadi di lapangan.

Meskipun sektor pertanian memberikan sumbangan yang besar dalam penciptaan kesempatan kerja dan jaminan pendapatan kepada masyarakat, namun ketidakseimbangan sistemik masih sering terjadi pada kelompok masyarakat tani yang sebagian besar berada di pedesaan. Meningkatnya kesempatan untuk memperoleh akses faktor produksi, serta potensi dan kesempatan yang beragam belum dapat mengurangi wajah kesenjangan antar sektor, daerah, dan golongan masyarakat pada sektor pertanian. Implikasi dari kondisi demikian membuat sebagian besar penduduk masih berada dalam kondisi tertinggal. Sehingga pembangunan pertanian seolah-olah hanya menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi pertanian yang lebih kuat. Hasil pembangunan pertanian tidak dapat terasa ke tingkat yang paling bawah sehingga tidak mampu mengangkat kesejahteraan petani seperti yang diharapkan.

Banyak program-program yang dirancang pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, mulai dari jaring pengaman sosial pada puncak krisis ekonomi, program padat karya, subsidi harga pangan dengan bantuan langsung berupa beras untuk keluarga miskin (raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun pada kenyataannya belum bisa mengurangi tingkat kemiskinan seutuhnya. Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan sering diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. Dengan demikian kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan.

Masalah kemiskinan di pedesaan lebih banyak dijumpai di wilayah yang berbasis lahan kering dan gejala kemiskinan tersebut, disebabkan antara lain oleh

daya dukung alam yang relatif kurang, prasarana sosial ekonomi yang belum merata dan kelembagaan belum menjangkau masyarakat setempat serta mutu sumberdaya manusia yang relatif masih rendah (PSE, 1993). Sementara itu, menurut Rachman (1989) dan Emanuel (2000) dalam Notoatmojo (2003), berbagai studi memberi gambaran bahwa kemiskinan suatu komunitas dicirikan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusianya, rendahnya penguasaan aset produktif, seperti lahan pertanian dan menurut Taryoto (1995) dalam Notoatmojo (2003) rendahnya aksesibilitas anggota masyarakat terhadap sumber permodalan dan peluang ekonomi.

Kesenjangan distribusi pendapatan diantara anggota masyarakat mempunyai korelasi positif dengan besarnya proporsi rumah tangga miskin di suatu komunitas. Sementara itu, berbagai studi memberikan gambaran bahwa kemiskinan suatu komunitas dicirikan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia (Quibria dan Srinivasan, 1993) dalam Zakaria dan Swastika (2005) dan rendahnya aksesibilitas anggota masyarakat terhadap sumber-sumber permodalan dan peluang ekonomi (Siamala, 1993).

Menurut Kasryno dan Suryana (1992) melihat bahwa ada dua karakteristik desa miskin, yaitu terbatasnya aset produktif seperti lahan dan kapital serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kedua karakteristik tersebut diduga merupakan kendala dalam mengaplikasikan suatu teknologi atau pemanfaatan secara optimal kesempatan-kesempatan ekonomi (Zakaria dan Swastika, 2005). Walaupun demikian secara umum dalam kondisi tertentu, perubahan teknologi dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan bagi masyarakat petani yang berpenghasilan rendah, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan petani (Binswanger dan Braun, 1991).

Masalah kemiskinan yang terjadi pada dasarnya akan bervariasi antar individu rumah tangga dan antar wilayah. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan dapat ditanggulangi dengan peningkatan keterampilan sumberdaya manusia melalui pengenalan dan penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dan spesifik lokasi, peningkatan sarana dan prasarana untuk membuka keterisolasian wilayah, dan memberikan kemudahan dalam akses modal dan pasar.

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik petani padi lahan kering?
2. Bagaimana keragaman pendapatan petani padi lahan kering dalam memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup?

D. Tujuan Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kemiskinan masyarakat petani padi lahan kering di Kabupaten Garut, secara spesifik tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan karakteristik petani padi lahan kering.
2. Mendeskripsikan keragaman pendapatan petani padi lahan kering dalam memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya merumuskan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat tani khususnya petani padi lahan kering. Studi ini diharapkan bermanfaat antara lain:

1. Manfaat akademis sebagai sumbangan keilmuan tentang karakteristik sosial ekonomi pada masyarakat tani khususnya petani padi lahan kering.
2. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah pusat dan daerah khususnya Kabupaten Garut dalam menyusun dan membuat kebijakan daerah khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani padi lahan kering.
3. Sebagai masukan bagi peneliti yang akan datang dalam studi yang berhubungan dengan kesejahteraan petani padi lahan kering di Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Garut.